

Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Berbasis *Collaborative Governance* di Kabupaten Tegal Tahun 2025–2026

Novianto Yoga Wibisono*

tanInfo.id

*Email Korespondensi: noviantoyogawibisono@gmail.com

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis pembangunan nasional yang memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan guna menjamin ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan secara berkelanjutan. Kabupaten Tegal sebagai salah satu daerah agraris di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan pembangunan pertanian sepanjang periode 2025–2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal, mengidentifikasi bentuk kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta merumuskan strategi pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen kebijakan. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, regulasi pemerintah, dokumen Pemerintah Kabupaten Tegal, publikasi ilmiah, serta berbagai sumber resmi yang berkaitan dengan ketahanan pangan tahun 2025–2026. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* berdasarkan teori *Collaborative Governance*, konsep ketahanan pangan FAO, dan pendekatan *Food System Resilience*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan Kabupaten Tegal didukung oleh kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pembangunan pertanian, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat keamanan, kelompok tani, dan masyarakat, serta modernisasi sistem pertanian. Selain meningkatkan produktivitas pangan, pendekatan tersebut juga memperkuat kelembagaan petani, perlindungan lahan pertanian, dan pengembangan sistem pangan yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Penelitian ini mengusulkan *Integrated Collaborative Food Security Model* (ICFSM) sebagai strategi pengembangan ketahanan pangan yang mengintegrasikan kepemimpinan daerah, inovasi teknologi, hilirisasi pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola kolaboratif untuk mewujudkan Kabupaten Tegal sebagai daerah mandiri pangan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Ketahanan Pangan, Collaborative Governance, Pertanian Berkelanjutan, Kabupaten Tegal, Pembangunan Daerah

Abstract

sustainable food security development. The research employed a qualitative descriptive approach using library research and policy document analysis. Data were collected from publications of Statistics Indonesia, the National Food Agency, government regulations, official documents of the Tegal Regency Government, scientific publications, and other authoritative sources related to food security during 2025–2026. Data were analyzed using content analysis based on the Collaborative Governance framework, the FAO food security concept, and the Food System Resilience approach. The findings indicate that food security development in Tegal Regency is supported by strong regional leadership, cross-sector collaboration involving local government, village administrations, security institutions, farmer groups, and local communities, as well as agricultural modernization. These initiatives have contributed not only to increasing agricultural productivity but also to strengthening farmer institutions, protecting agricultural land, and improving the resilience of the regional food system. This study proposes the Integrated Collaborative Food Security Model (ICFSM) as an innovative framework integrating collaborative governance, technological innovation, agricultural downstream development, and community empowerment to achieve sustainable regional food security.

Keywords: Food Security, Collaborative Governance, Sustainable Agriculture, Tegal Regency, Regional Development

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu pembangunan global yang menjadi perhatian berbagai negara karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan ketahanan nasional. Menurut *Food and Agriculture Organization (FAO)*, ketahanan pangan tercapai apabila seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan setiap saat. Konsep tersebut dibangun atas empat dimensi utama, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan global berupa perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, konflik geopolitik, pandemi, serta gangguan rantai pasok telah meningkatkan risiko terhadap sistem pangan dunia (FAO, 2025). Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pembangunan sistem pangan yang tangguh (*food system resilience*), adaptif, dan berkelanjutan.

Ketahanan pangan di Indonesia menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Penguatan ketahanan pangan juga menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan pertanian nasional melalui peningkatan produktivitas komoditas strategis, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, modernisasi alat dan mesin pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan cadangan pangan pemerintah. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan karakteristik wilayah sehingga mampu menjamin keberlanjutan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah agraris di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan regional maupun nasional. Sektor pertanian masih menjadi salah satu penyumbang terhadap perekonomian daerah dan sumber mata pencaharian masyarakat (BPS Jawa Tengah., 2025). Selama periode 2025–2026, Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat pembangunan pertanian melalui modernisasi alat dan mesin pertanian, perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas petani, pengembangan infrastruktur irigasi, serta pemberdayaan kelembagaan petani. Komitmen tersebut memperoleh pengakuan melalui penghargaan sebagai pelopor ketahanan pangan berbasis

pertanian pada ajang penghargaan tingkat nasional. Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat sinergi melalui penandatanganan komitmen bersama ketahanan pangan Jawa Tengah, pelaksanaan panen raya jagung bersama aparat keamanan, pembinaan program ketahanan pangan desa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan dipandang sebagai tanggung jawab bersama bagi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga lainnya.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji ketahanan pangan dari berbagai perspektif. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang dibangun melalui dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama (Ansell & Gash, 2008). Emerson & Nabatchi (2015) mengembangkan konsep *Collaborative Governance Regimes* yang menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks. Penelitian FAO (2023) menunjukkan bahwa pembangunan sistem pangan berkelanjutan harus mengintegrasikan aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan perlindungan lingkungan. Penelitian mengenai ketahanan pangan daerah di Indonesia umumnya berfokus pada produktivitas pertanian, diversifikasi pangan, atau kelembagaan petani. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan kepemimpinan daerah, kolaborasi lintas sektor, dan strategi pembangunan pertanian berkelanjutan pada tingkat kabupaten masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*). Sebagian besar studi sebelumnya mengkaji ketahanan pangan dari aspek teknis atau kelembagaan secara terpisah, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan konsep *Collaborative Governance*, *Food System Resilience*, dan pembangunan pertanian berkelanjutan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal selama periode 2025–2026. Selain itu, penelitian ini menawarkan *Integrated Collaborative Food Security Model (ICFSM)* sebagai model konseptual yang menghubungkan kepemimpinan daerah, kolaborasi multipihak, inovasi teknologi, penguatan kelembagaan petani, hilirisasi pertanian, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu kerangka pembangunan ketahanan pangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal selama periode 2025–2026, mengidentifikasi bentuk *collaborative governance* yang berkembang dalam pembangunan pertanian daerah, serta merumuskan strategi penguatan ketahanan pangan berkelanjutan yang dapat menjadi

rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan analisis dokumen kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal selama periode 2025–2026. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang meliputi dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Tegal, publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, regulasi nasional, artikel ilmiah nasional maupun internasional, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan program ketahanan pangan daerah. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian informasi sehingga mampu menggambarkan kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal secara utuh.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles *et al.*, (2014). Seluruh temuan dianalisis menggunakan kerangka teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2008), konsep ketahanan pangan FAO, serta pendekatan *Food System Resilience* untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, kolaborasi antaraktor, dan pembangunan sistem pangan berkelanjutan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari dokumen pemerintah, publikasi statistik, artikel ilmiah, serta berbagai laporan resmi sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dengan judul “Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Berbasis *Collaborative Governance* di Kabupaten Tegal Tahun 2025–2026” memberikan beberapa poin hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan memiliki bobot lima poin. Hasil dan pembahasan yang didapatkan pada penelitian ini yaitu:

Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026

Kabupaten Tegal merupakan salah satu wilayah agraris di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan regional. Kondisi

geografis yang terdiri atas dataran rendah, kawasan tengah, hingga daerah pegunungan memungkinkan pengembangan berbagai komoditas pertanian, seperti padi, jagung, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Keanekaragaman agroekosistem tersebut menjadi modal dasar dalam membangun sistem pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung perekonomian daerah.

Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal (BPS Kabupaten Tegal, 2025). Sebagian besar penduduk perdesaan menggantungkan mata pencaharian pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, maupun perkebunan. Kondisi tersebut menjadikan pembangunan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga sebagai instrumen pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan rumah tangga petani, serta penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. Penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026

Pada periode 2025–2026, Pemerintah Kabupaten Tegal menempatkan pembangunan pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui peningkatan mekanisasi pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut memperoleh pengakuan nasional melalui penghargaan Disway Top Regional Leader Awards 2026 sebagai pelopor ketahanan pangan berbasis pertanian. Penghargaan tersebut tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor

pertanian, tetapi juga menunjukkan adanya kepemimpinan daerah yang mampu mengintegrasikan berbagai program pembangunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan konsep ketahanan pangan FAO, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal telah memperkuat dimensi ketersediaan pangan (*food availability*) melalui peningkatan kapasitas produksi dan perlindungan sumber daya pertanian. Namun demikian, pembangunan ketahanan pangan tidak dapat berhenti pada aspek produksi. Ketersediaan pangan menurut Badan Pangan Nasional (2025) harus diikuti dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, penguatan kualitas konsumsi, serta stabilitas sistem pangan agar mampu menghadapi berbagai gangguan, termasuk perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.

Implementasi *Collaborative Governance* Melalui Sinergi Pemangku Kepentingan Dalam Penguatan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal selama periode 2025–2026 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga oleh efektivitas kolaborasi antarpemangku kepentingan. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), yang menekankan bahwa penyelesaian permasalahan publik memerlukan proses kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan berbagai lembaga lainnya melalui dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, serta pengambilan keputusan secara kolektif.

Kabupaten Tegal sendiri, pemerintah berperan sebagai aktor utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan pertanian melalui peningkatan produktivitas pangan, modernisasi alat dan mesin pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas kelembagaan petani. Kepemimpinan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai *facilitative leadership*, yaitu mengoordinasikan berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, kelompok tani, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan aparat keamanan agar memiliki tujuan yang sama dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Peran kepemimpinan tersebut tercermin dari berbagai inisiatif pembangunan pertanian yang memperoleh pengakuan nasional sebagai pelopor ketahanan pangan berbasis pertanian.

Pada tingkat implementasi, penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah sebagai perumus kebijakan, pemerintah desa sebagai pelaksana program berbasis

masyarakat, aparat keamanan sebagai pendukung stabilitas dan koordinasi, hingga kelompok tani, penyuluh pertanian, akademisi, dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Kolaborasi tersebut mencerminkan penerapan *Collaborative Governance* yang menempatkan koordinasi lintas sektor, pembagian peran, serta partisipasi masyarakat sebagai faktor penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.



Gambar 2. Percontohan Program Ketahanan Pangan di Desa Munjungagung

Implementasi *Collaborative Governance* dalam penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga diimplementasikan hingga tingkat desa sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Salah satu contoh implementasi tersebut dapat diamati pada Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan monitoring program ketahanan pangan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Tegal pada tahun 2026 yang mana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya koordinasi vertikal antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam memastikan bahwa program ketahanan pangan berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

Pembinaan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengawasan administratif, tetapi juga sebagai sarana pendampingan teknis, evaluasi program, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola program ketahanan pangan. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama yang mengoordinasikan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok tani, Kelompok Wanita Tani (KWT), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Dalam perspektif *Collaborative Governance*, keterlibatan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok tani, dan masyarakat merupakan bentuk kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder collaboration*) yang memperkuat efektivitas implementasi kebijakan publik. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif dipengaruhi oleh adanya dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses, serta pemahaman bersama (*shared understanding*). Seluruh elemen tersebut tercermin dalam pelaksanaan pembinaan program ketahanan pangan di Desa Munjungagung, di mana pemerintah daerah tidak hanya memberikan arahan kebijakan, tetapi juga melakukan pendampingan langsung terhadap pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan program berbasis potensi lokal.

Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, program pembinaan tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, seperti keterbatasan sarana produksi, kebutuhan peningkatan kapasitas petani, hingga pengembangan usaha ekonomi berbasis pangan. Informasi tersebut menjadi umpan balik (*feedback mechanism*) bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa tidak hanya bersifat hierarkis, tetapi berkembang menjadi kemitraan kolaboratif yang saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

Keberhasilan implementasi program di Desa Munjungagung menunjukkan bahwa desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan ketahanan pangan. Apabila model pembinaan, pendampingan, dan monitoring tersebut direplikasi secara konsisten pada desa-desa lain di Kabupaten Tegal, maka akan terbentuk jaringan kelembagaan pangan desa yang mampu memperkuat ketahanan pangan daerah secara menyeluruh. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan memerlukan integrasi antara kepemimpinan pemerintah daerah, kapasitas pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan dukungan lintas sektor dalam satu sistem tata kelola kolaboratif.

Temuan penelitian ini memperkuat teori *Collaborative Governance* yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan fasilitatif, kepercayaan antarpemangku kepentingan, serta komitmen terhadap tujuan bersama. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya pengembangan konsep, yaitu bahwa kolaborasi dalam pembangunan ketahanan pangan daerah perlu

diintegrasikan dengan transformasi digital pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi desa, dan hilirisasi komoditas pertanian agar sistem pangan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan tantangan pembangunan di masa depan.

Analisis Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Berdasarkan Empat Pilar Fao

Analisis terhadap implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal dilakukan menggunakan empat pilar ketahanan pangan yang dikembangkan oleh FAO, yaitu *food availability*, *food access*, *food utilization*, dan *food stability*. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai capaian pembangunan pangan daerah.

Tabel 1. Analisis Implementasi Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal Berdasarkan Empat Pilar FAO

Pilar Ketahanan Pangan	Implementasi di Kabupaten Tegal	Analisis
<i>Availability</i>	Modernisasi pertanian, perlindungan lahan, peningkatan produksi	Ketersediaan pangan semakin kuat melalui peningkatan kapasitas produksi
<i>Access</i>	Penguatan kelembagaan petani dan pembangunan ekonomi desa	Akses ekonomi masyarakat terhadap pangan mulai meningkat, namun masih dipengaruhi fluktuasi harga
<i>Utilization</i>	Penyuluhan pertanian, diversifikasi pangan, pemberdayaan masyarakat	Pemanfaatan pangan berkembang melalui peningkatan pengetahuan masyarakat
<i>Stability</i>	Komitmen pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, perlindungan lahan	Stabilitas pangan semakin baik, tetapi masih menghadapi ancaman perubahan iklim

Sumber: Analisis Data Premier & Sekunder, 2026

Berdasarkan analisis tersebut, Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan yang cukup baik terutama pada aspek ketersediaan pangan. Berbagai kebijakan pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kapasitas produksi melalui mekanisasi pertanian, rehabilitasi infrastruktur irigasi, penyediaan sarana produksi, serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun demikian, aspek akses dan stabilitas pangan masih memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, serta dinamika pasar pangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian FAO yang menyatakan bahwa keberhasilan ketahanan pangan memerlukan keseimbangan antara produksi, distribusi, konsumsi, dan keberlanjutan sistem pangan. Dengan demikian, pembangunan pangan tidak cukup hanya

meningkatkan hasil panen, tetapi juga harus memperkuat rantai nilai, kelembagaan petani, dan sistem distribusi pangan.

Analisis Swot Pengembangan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal

Untuk merumuskan strategi pengembangan ketahanan pangan yang lebih efektif, penelitian ini menggunakan analisis SWOT dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pembangunan pertanian di Kabupaten Tegal.



Gambar 3. Analisis SWOT Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal memiliki kekuatan yang cukup besar berupa sumber daya pertanian, komitmen pemerintah daerah, serta dukungan kelembagaan. Analisis tersebut diharapkan sesuai cita-cita bangsa yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan prinsip otonomi daerah sesuai dengan Amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian, keberhasilan pembangunan pangan jangka panjang memerlukan strategi yang mampu mengurangi kelemahan internal dan mengantisipasi ancaman eksternal. Oleh karena itu, strategi pembangunan ketahanan pangan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transformasi digital, perlindungan lahan, dan penguatan kelembagaan ekonomi petani.

Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tegal

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengusulkan strategi pengembangan ketahanan pangan yang disusun dalam kerangka *Integrated Collaborative Food Security Model (ICFSM)*. Model ini mengintegrasikan pendekatan *Collaborative Governance*, sistem pangan berkelanjutan, dan inovasi teknologi sebagai fondasi pembangunan pangan daerah. Model tersebut dibangun atas enam komponen utama, yaitu kepemimpinan daerah yang adaptif, kolaborasi multipihak, modernisasi pertanian, penguatan kelembagaan petani, hilirisasi produk pertanian, serta pembangunan sistem pangan yang tangguh terhadap perubahan iklim. Keenam komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk siklus pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan kemandirian pangan daerah.

Secara implementatif, strategi penguatan ketahanan pangan Kabupaten Tegal diarahkan pada beberapa agenda prioritas. Pertama, memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pembaruan data spasial dan pengendalian alih fungsi lahan. Kedua, mempercepat digitalisasi sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ketiga, meningkatkan kapasitas petani melalui pendidikan, pelatihan, dan regenerasi petani muda. Keempat, mengembangkan agroindustri berbasis komoditas lokal agar nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati oleh petani. Kelima, memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes pangan dan koperasi tani. Keenam, membangun sistem informasi ketahanan pangan daerah yang terintegrasi sehingga mampu menyediakan data produksi, distribusi, stok, dan harga secara real time. Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Tegal secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek produksi, tetapi juga dalam distribusi, konsumsi, dan keberlanjutan sistem pangan. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak hanya menghasilkan peningkatan produktivitas, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Tegal selama periode 2025–2026 telah berkembang melalui pendekatan yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Implementasi kebijakan yang didukung oleh kepemimpinan pemerintah daerah, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kelompok tani, aparat

keamanan, serta masyarakat telah memperkuat kapasitas daerah dalam menjaga ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Pendekatan *Collaborative Governance* terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan melalui koordinasi lintas sektor, pembagian peran yang jelas, serta penguatan kelembagaan lokal. Selain itu, strategi pembangunan pertanian yang menitikberatkan pada modernisasi pertanian, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penguatan kelembagaan petani, hilirisasi produk pertanian, dan transformasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Tegal memperkuat sistem informasi ketahanan pangan berbasis digital, memperluas penerapan teknologi pertanian presisi, meningkatkan regenerasi petani melalui pendidikan vokasi dan kewirausahaan agribisnis, memperkuat peran BUMDes dan koperasi tani sebagai lembaga ekonomi desa, serta mengembangkan forum kolaborasi ketahanan pangan yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pangan daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tegal beserta seluruh organisasi perangkat daerah yang telah menyediakan berbagai informasi mengenai pembangunan ketahanan pangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, serta seluruh lembaga dan pihak yang telah menerbitkan data, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah yang menjadi sumber penyusunan artikel ini. Apresiasi turut diberikan kepada panitia Seminar Nasional Pembangunan atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pangan Nasional. (2025). *Laporan kinerja Badan Pangan Nasional tahun 2025*. Badan Pangan Nasional.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal. (2025). *Kabupaten Tegal dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Tegal.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Provinsi Jawa Tengah dalam angka*

2025. BPS Provinsi Jawa Tengah.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.

Food and Agriculture Organization. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023*. FAO.

Food and Agriculture Organization. (2025). *The state of food security and nutrition in the world 2025*. FAO.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Pemerintah Desa Munjungagung. (2026, 12 Februari). *Pembinaan dan monitoring program ketahanan pangan Desa Munjungagung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal*.
<https://munjungagung.desa.id/index.php/artikel/2026/2/12/pembinaan-dan-monitoring-program-ketahanan-pangan-desa-munjungagung-oleh-dinas-pemberdayaan-masyarakat-dan-des-kabupaten-tegal>.

Pemerintah Kabupaten Tegal. (2026, 12 Juni). *Bupati Tegal raih Disway Top Leader Award 2026 sebagai pelopor ketahanan pangan berbasis pertanian*.
https://tegalkab.go.id/news/view/berita/bupati_tegal_raih_disway_top_leader_award_2026_sebagai_pelopor_ketahanan_pangan_berbasis_pertanian_20260612060618.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.